

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Dewasa ini perkembangan dunia usaha semakin pesat. Pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat (Purnamawati, 2018). Salah satu sektor usaha yang berkembang saat ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran dan potensi yang sangat besar terhadap perekonomian bangsa dan menjadi pelopor dari sektor lainnya yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Besarnya peran UMKM terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia menyebabkan pemberdayaan UMKM menjadi prioritas dalam ekonomi global. Menurut (Hasanah, 2020), UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Perkembangan usaha yang semakin pesat, UMKM harus bisa bersaing secara kompetitif. UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dan pada tahun 2019, jumlah UMKM mencapai 65,5 juta. Diperkirakan di tahun 2020 dan beberapa tahun ke depan jumlah pelaku UMKM akan semakin meningkat. UMKM terdiri atas usaha kecil, mikro dan menengah. UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2018 sebesar Rp5.721,1 triliun dan meningkat 22,9% pada tahun 2019 menjadi Rp7.034,1 triliun (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Besarnya kontribusi

yang diberikan ke negara mayoritas disumbangkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia tidak lepas dari jumlah peningkatan di masing-masing daerah khususnya di Kabupaten Buleleng. UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Berikut ini data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1  
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng  
Tahun 2019 s/d 2021

No	Klasifikasi Usaha	DATA UMKM					
		2019		2020		2021	
		Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal
1	Usaha Mikro	5.114	20.934	5.709	38.961	7.007	40.304
2	Usaha Kecil	3.481	5.813	3.655	5.921	3.662	5.992
3	Usaha Menengah	192	4	217	9	225	9
4	Usaha Besar	17	-	17	-	17	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.804</b>	<b>26.751</b>	<b>9.598</b>	<b>44.891</b>	<b>10.911</b>	<b>46.305</b>

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2022).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng. Dengan meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng, oleh karena itu laporan keuangan usaha semakin diperhatikan oleh pemilik UMKM. Dilihat dari fenomena yang ada

sebagian besar UMKM di Indonesia belum membuat laporan keuangan dengan baik sesuai standar akuntansi.

Menurut (Zhang & Ye, 2010), dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun dalam mempertimbangkan melakukan persaingan secara global, UMKM harus mampu membuat laporan keuangan secara efektif sebagai tantangan besar bagi pelaku UMKM. Apabila usaha dengan kategori usaha skala kecil dan menengah tidak mampu bersaing dengan usaha lainnya maka akan kalah dalam persaingan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Sari, 2019), usaha menengah wajib untuk menyusun laporan keuangan dan harus sesuai dengan SAK EMKM, sedangkan jenis usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan, namun jika sanggup bisa untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, UMKM perlu membuat pencatatan keuangan agar dapat mengetahui laporan keuangan usaha yang dimiliki dan mampu bersaing secara kompetitif. Laporan keuangan merupakan komponen vital untuk mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan pencapaian hasil usaha perusahaan yang dilaporkan setiap akhir periode sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban (Christian, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 24 Oktober 2014 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 yang berguna untuk membantu pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan (IAI, 2016). Salah satu kunci kesuksesan sebuah usaha, dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang memadai (Herawati et al., 2019). SAK EMKM dibentuk lebih sederhana dibandingkan dengan SAK lainnya. Tentu saja dengan penerbitan SAK

EMKM ini memudahkan para pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan dengan cepat dan mudah.

Berdasarkan sumber berita yang telah dilansir dari (Mediaindonesia.com, 2021) yang menyatakan bahwa UMKM belum memiliki pembukuan laba rugi, harga pokok produksi dan pencatatan aset. Para pelaku UMKM mempunyai keterbatasan terhadap pengetahuan akuntansi yang dimiliki dan beranggapan bahwa pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang terlalu rumit dan tidak penting. Dilansir dari berita (Liputan6.com, 2021) yang menyatakan bahwa UMKM sulit mendapatkan pembiayaan formal, dikarenakan tidak mempunyai aset untuk dijaminkan serta tidak adanya pencatatan laporan keuangan yang membuat UMKM kesulitan dalam memperoleh pinjaman dana kepada lembaga penyalur kredit. Menurut (Widyastuti, 2017) menyatakan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Akuntansi berperan penting terhadap kemajuan suatu usaha. Namun, masih banyak UMKM yang belum memahami arti penting akuntansi pada implementasi laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, padahal hal tersebut sangat besar manfaatnya bagi perkembangan usaha (Julianto et al., 2020). Berikut ini merupakan beberapa usaha Kecil dan Menengah yang ada di kabupaten Buleleng yang diminta keterangan terkait penerapan SAK EMKM.

Tabel 1.2  
Data Observasi Awal Usaha Kecil dan Menengah  
di Kabupaten Buleleng

No.	Nama Usaha	Bidang Usaha	Alamat	Penerapan SAK EMKM
-----	------------	--------------	--------	--------------------

1.	Usaha Baja Ringan	Perdagangan	Jl. Wr. Supratman, Kel. Penarukan, Buleleng	Belum membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM
2.	Usaha Salon Kecantikan	Jasa	Jl. Ahmad Yani, Kaliuntu, Singaraja	Masih mencatat pembukuan dengan sederhana menggunakan nota, kwitansi.
3.	Usaha Bahan Bangunan	Perdagangan	Jl. Raya Kerobokan Singaraja, Buleleng	Belum menerapkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, pencatatan transaksi menggunakan pembukuan secara sederhana

Data diolah Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, hasil observasi dan kunjungan ke beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng bahwa pelaku usaha hanya membuat pembukuan secara sederhana dan tidak sistematis, hanya mencatat apa yang dipahami seperti mencatat pendapatan dan beban-beban terhadap aktivitas operasi usahanya secara manual. Menurut Bapak Eky Gito Irwanto selaku *Assistant Relationship Manager (ARM)* di salah satu lembaga penyalur kredit memaparkan bahwa dalam pengajuan kredit harus ada laporan keuangan usaha yang menjadi syarat pemberian kredit. Tujuannya agar pihak pemberi kredit dapat menganalisa apakah usaha tersebut layak untuk diberikan modal dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena pelaku usaha tersebut belum membuat laporan keuangan yang jelas dan sistematis, hal tersebut menjadi pertimbangan oleh lembaga penyalur kredit memberikan tambahan untuk modal usaha bagi pelaku usaha. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Darmasari & Wahyuni, 2020) menjelaskan bahwa secara umum beberapa penyebab UMKM di Kabupaten Buleleng belum mampu menerapkan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, diantaranya pelaku UMKM di Buleleng mayoritas belum menyadari



pentingnya pencatatan keuangan usahanya. Diketahui juga bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng tidak membedakan penggunaan modal pribadi dan modal usaha dalam operasional usahanya. Menurut (Andriani et al., 2014), faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP yaitu faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurang pengawasan dari *stakeholder* yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Berdasarkan *theory of planned behavior* dijelaskan bahwa terdapat aspek yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM dalam diri individu. Aspek tersebut adalah *perceived behavioral control* (PBC) dan *subjective norm*. *Perceived Behavioral Control* (PBC) didasarkan atas suatu keyakinan yang terdapat dalam diri setiap individu terkait ada atau tidaknya aspek pendukung atau penghalang seseorang untuk membentuk sebuah perilaku tertentu (TPB; Ajzen 1988, 1991). Keyakinan diperoleh dari pengalaman terdahulu seseorang yang berkaitan dengan perilaku yang dapat meningkatkan atau menurunkan sikap seseorang tentang seberapa mudah dan sulitnya melakukan suatu tindakan. Sehingga pemahaman teknologi informasi, pendidikan dimasukkan *perceived behavior control* suatu behavior dalam hal ini yaitu menerapkan SAK EMKM (Pratama, 2021). Sedangkan *subjective norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting bagianya untuk bersedia menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan Ajzen (2005). Sehingga variabel sosialisasi termasuk ke dalam *theory of planned behavior* pada determinan kedua pengaruh sosial (*subjective norm*), dalam hal ini yaitu menerapkan SAK EMKM.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangan usahanya yaitu minimnya penguasaan teknologi informasi. Pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi ketika ingin meluaskan usahanya untuk dapat bersaing di dunia usaha. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Teknologi informasi sangat penting diterapkan pada kegiatan usaha, dimana akan mempermudah dalam pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dan dapat meminimalisir kesalahan pembukuan akuntansi (Kusumasari, 2021). Rendahnya kualitas SDM yang menyebabkan para pelaku usaha belum maksimal dalam menjalankan aktivitas usaha untuk membuat laporan keuangan usaha sehingga dapat mempengaruhi kapasitas usaha. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan pemilik usaha yang masih rendah.

Keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan mengikuti secara aktif kegiatan sosialisasi atau pelatihan untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan serta memperluas jangkauan usahanya. Sehingga diperlukan peran pemerintah untuk membantu menumbuhkan UMKM agar lebih produktif. Penerapannya dapat dilakukan memanfaatkan keberadaan teknologi yang ada. Pada pelaksanaannya dapat dikelola dari pihak pemerintah misalnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM untuk memberikan sosialisai terkait pemanfaatan teknologi dan penerapan laporan keuangan sesuai standar.

Menurut (Lathifah, 2018) menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Paham dengan teknologi

informasi saat ini, maka penerapan standar akuntansi keuangan akan terealisasi. Semakin tinggi tingkat pemahaman teknologi informasi maka semakin luas pandangan para pelaku UMKM terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di dalam kehidupan bisnisnya. Paham adanya teknologi informasi saat ini dapat mendorong percepatan penyediaan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM (Teguh, 2022). Pentingnya pemahaman teknologi Informasi bertujuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi, sebab informasi akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha (Nurhidayanti, 2020). Hal ini menandakan bahwa pemahaman teknologi informasi penting bagi UMKM dalam membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Setiap pelaku usaha dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi agar mudah dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal (Silvia & Azmi, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Kusumasari, 2021) yang menyatakan bahwa secara parsial pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitrisia, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhidayanti, 2020) dan (Pratama, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM. Hal ini menunjukkan adanya *inconsistent* hasil penelitian mengenai penerapan SAK EMKM. Adanya *inconsistens* mengenai pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM menjadi dasar alasan mengapa peneliti ingin meneliti kembali pengaruh pemahaman teknologi



informasi terhadap penerapan SAK EMKM. Semakin paham terhadap teknologi informasi maka akan semakin luas pandangan terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di dalam kehidupan bisnis dan akan dapat mendorong percepatan penyedia informasi akuntansi yaitu berupa laporan keuangan bagi UMKM. Oleh sebab itu, pemahaman teknologi informasi sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat membuat dan menerapkan sesuai SAK EMKM. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pemahaman teknologi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Menurut (R, Rudiantoro dan Siregar, 2012) terdapat faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi pelaku usaha mengenai pentingnya laporan keuangan bagi perkembangan usaha yaitu jenjang pendidikan terakhir, dan latar belakang pendidikan. Menurut Lohanda (2017) Tingkat Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan potensi diri dalam hal kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dimana hal tersebut dimiliki melalui pendidikan formal dan disahkan oleh Departemen Pendidikan. Penerapan SAK EMKM sangat penting dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena dengan tingkat pendidikan yang layak para pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya laporan keuangan, dan menerapkan sesuai standar akuntansi. Pelaku usaha yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi akan lebih mudah menerapkan SAK EMKM sebagai pelaporan keuangan (Sulistiyawati, 2020).

Pengetahuan pelaku usaha dalam penerapan SAK EMKM masih rendah dikarenakan karena tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku usaha khususnya usaha kecil dan menengah masih terbatas dan sebagian besar merupakan

lulusan SMA/SMK/MA/yang sederajat. Tingkat pendidikan merupakan pendidikan terakhir baik formal maupun non formal yang dimiliki oleh seseorang. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola berfikir (Sari, 2020). Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau memiliki pengetahuan akuntansi akan mengetahui manfaat dari penerapan SAK EMKM (Kusuma & Lutfiany, 2018). Pendidikan merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi keuangan yang ditentukan oleh pendidikan formal yang ditempuh (Hastuti et al., 2017). Menurut (Kholis, 2014) semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku UMKM maka makin tinggi tingkat penerapan laporan informasi akuntansi yang ada di dalam usaha tersebut. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK-EMKM (Sari, 2020). Pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas (Mutuari & Yudiantara, 2021).

Menurut (Kusumasari, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Larasati & Farida, 2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Hal ini menunjukkan adanya *inconsistent* hasil penelitian mengenai penerapan SAK EMKM. Adanya *inconsistens* mengenai pengaruh pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM menjadi dasar alasan mengapa peneliti ingin meneliti kembali pengaruh pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM. Pendidikan saat ini berperan penting, karena akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau latar

pendidikan seseorang, maka pemahaman akuntansinya akan semakin luas. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi dalam menerapkan SAK EMKM adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses untuk mensosialisasikan, memperkenalkan dan membantu UMKM dalam mengetahui serta memahami tentang SAK EMKM Tuti & Dwijayanti dalam Wati (2021). Menurut (R, Rudiantoro dan Siregar, 2012), sosialisasi mempunyai hubungan yang positif terhadap penerapan SAK ETAP. Hubungan antara sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM dikatakan positif apabila tingkat dukungan akan penggunaan SAK EMKM dari masyarakat, kreditur, pemerintah dan organisasi atau lembaga yang berwenang itu tinggi, maka akan tinggi pula pelaku usaha dalam menerapkan SAK EMKM. Menurut (Silvia & Azmi, 2019) menyatakan bahwa sosialisasi mengenai SAK EMKM adalah suatu bentuk usaha yang perlu dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) ataupun lembaga-lembaga terkait informasi yang ada dalam hal SAK EMKM agar dapat semakin meningkat. Sosialisasi disini dapat berfungsi sebagai cara yang efektif agar informasi yang diberikan dapat meningkatkan minat pelaku usaha dalam menerapkan SAK EMKM. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap SAK ETAP karena dengan adanya sosialisasi bagi pelaku UMKM dapat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi (Sari, 2020).

Menurut (Prawesti, 2017) sosialisasi berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mengenalkan kepada para pelaku UMKM mengenai standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu SAK-EMKM. Sosialisasi mengenai SAK EMKM sangat penting bagi para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi. Tidak

sedikit UMKM khususnya di Kabupaten Buleleng mengaku bahwa mereka belum memahami bahkan tidak mengetahui tentang SAK EMKM karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak eksternal. Pemberian sosialisasi secara intensif akan memberikan pengaruh kepada para pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM (Teguh, 2022). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah baru diterbitkan, sangat perlu untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Buleleng yang pertumbuhan UMKM setiap tahunnya terus meningkat, maka pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Diperlukan adanya penyuluhan penerapan laporan keuangan berbasis SAK ETAP bagi para pelaku usaha sektor UMKM (Widyastuti, 2017). Menurut (Larasati & Farida, 2021) dengan adanya sosialisasi diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas diri untuk mengerti dan memahami bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Penelitian yang dilakukan (Adryant dan Rita, 2020) dan (Usman & Didiet, 2021) memperoleh hasil bahwa sosialisasi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Christian, 2020) yang menyatakan sosialisasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lathifah, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP. Hal ini menunjukkan adanya *inconsistent* hasil penelitian mengenai penerapan SAK EMKM. Adanya *inconsistens* mengenai pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM



menjadi dasar alasan mengapa peneliti ingin meneliti kembali pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM. Para pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait penerapan SAK EMKM yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2018. Oleh sebab itu, adanya sosialisasi terkait SAK EMKM sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat membuat dan menerapkan sesuai SAK EMKM. Sehingga dapat diasumsikan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Uraian diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan teori dan hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu dalam penelitian ini menjadi hal yang menarik untuk diuji kembali pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi dengan menggunakan sampel yang berbeda. Sampel dari penelitian terdahulu kebanyakan menysasar pada UMKM secara keseluruhan. Maka dalam penelitian ini keterbaruan sampel yang digunakan adalah secara spesifik menysasar pada jenis usaha kecil dan menengah berada di Kabupaten Buleleng. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omzet kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Sedangkan untuk usaha menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omzet antara Rp 1 sampai dengan Rp 50 milyar per tahun (Dewi Suryani, Purba, 2021).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Pendidikan, dan Sosialisasi Terhadap Penerapan SAK EMKM pada Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng”**



## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2019 sampai tahun 2021 di Kabupaten Buleleng dan diduga pada tahun 2022 persaingan akan semakin kompetitif.
2. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan pemilik UMKM terutama usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng tentang teknologi informasi
3. Tingkat pendidikan pelaku UMKM yang sebagian besar merupakan lulusan SMA/SMK/MA/ yang sederajat, menjadi salah satu kendala dalam menerapkan SAK-EMKM.
4. Kurangnya sosialisasi terkait penerapan SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan untuk pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sosialisasi sangat diperlukan untuk penambahan informasi dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
5. Pemilik UMKM kesulitan memperoleh pinjaman dana kepada lembaga penyalur kredit untuk tambahan modal usaha.
6. Terjadi perbedaan hasil penelitian terdahulu antara variabel pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM.

### 1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada pelaku usaha khususnya Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng, maka penelitian ingin membatasi permasalahan mengenai pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SAK EMM.

### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK EMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan dan sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi terkait mata kuliah Akuntansi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya tentang pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan serta pedoman untuk menerapkan pengetahuan terkait bagaimana pengaruh pemahaman teknologi informasi, pendidikan, dan sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM pada Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng.

#### b. Bagi Pemilik UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pelaku UMKM sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam membuat laporan keuangan dengan menerapkan SAK EMKM.

#### c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bahan bacaan di bidang ekonomi khususnya mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM dan dapat mendorong dilakukannya penelitian selanjutnya untuk mengembangkan serta mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada UKM.